PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki luas daratan 1,9 juta km² tersebar pada sekitar 17.500 buah pulau yang disatukan oleh laut seluas 5,8 juta km², dengan panjang garis pantai 81.000 km (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada). Keanekaragaman hayati laut yang dimiliki Indonesia merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbarui (renewable resources) dan potensinya sangat besar harus dikelola pemanfaatannya secara arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan (Dahuri, 2003). Dengan luas laut yang lebih dari tiga kali luas daratan, sebaiknya Indonesia juga mengembangkan keunggulan bersaingnya melalui pemanfaatan sumber daya laut dan pengolahan hasil lautnya.


Potensi sumber daya perikanan laut yang besar tersebut, secara tradisional dan turun-temurun telah menjadikan kegiatan perikanan tangkap sebagai sumber mata pencaharian para nelayan. Data terakhir, nelayan di Indonesia mencapai 2.346.782 orang yang tersebar di semua propinsi, dengan jumlah terbanyak berada di Jawa (26,74 %) diikuti oelh nelayan di Sumatera (22,21 %). Ini berarti
2

bahwa hampir 50 persen nelayan di Indonesia berasal dari Jawa dan Sumatera. (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006). Namun, nelayan perikanan tangkap yang jumlahnya cukup besar tersebut justru melemahkan posisinya terhadap pembeli atau industri pengolahan yang menggunakan hasil perikanan tangkap sebagai bahan baku utamanya. Di samping itu, sifat hasil perikanan tangkap yang berfluktuasi menurut musim dan mudah rusak (perishable), juga semakin memperlemah posisi tersebut, sehingga pada akhirnya nelayan perikanan tangkap cenderung menjadi price-taker dan memperoleh bagian pendapatan yang relatif kecil.

Untuk memastikan agar hasil perikanan tangkap tidak tergantung pada pembeli, nelayan dapat melakukan integrasi ke depan (forward integration) dari kegiatan perikanan tangkap yang sudah ada ke industri pengolahan hingga ke kegiatan usaha distribusi hasil olahan, melalui kepemilikan langsung pada kedua kegiatan usaha hilir tersebut. Meskipun pada kenyataan yang ada hingga saat ini, kebanyakan industri pengolahan lebih sering melakukan integrasi balik (backward integration) untuk memastikan harga, mutu dan kontinuitas pasokan bahan baku.

Pengolahan hasil perikanan tangkap menjadi produk olahan yang siap dikonsumsi ataupun digunakan untuk proses produksi selanjutnya merupakan bentuk pengembangan agroindustri yang mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di samping itu, pembangunan sektor perikanan yang berwawasan agroindustri dapat menyediakan kesempatan kerja bagi penduduk setempat dan meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan.

Kegiatan perikanan tangkap di Indonesia, khususnya untuk kategori kapal motor (inboard motor), jumlahnya didominasi oleh kapal motor berukuran <5 GT hingga 30 GT yang jumlahnya mencapai 122.615 unit atau 96,6 persen dari total kapal motor yang berjumlah 126.933 unit (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006). Untuk kapal motor ukuran <5 GT hingga 30 GT, pengoperasianya dilakukan oleh anak buah kapal kurang dari 19 orang sehingga kegiatan usaha penangkapan ikan yang memperkerjakan tenaga kerja kurang dari 19 orang ini dapat dikategorikan sebagai usaha skala kecil, dan di samping itu nilai tangkapan

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Usaha Kecil</td>
<td>&lt; 200</td>
<td>&lt; 1.000</td>
<td>&lt; 19</td>
</tr>
<tr>
<td>Usaha Menengah</td>
<td>200 – 1.000</td>
<td>1.000 – 50.000</td>
<td>20 – 100</td>
</tr>
<tr>
<td>Usaha Besar</td>
<td>&gt; 1.000</td>
<td>&gt; 50.000</td>
<td>&gt; 100</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2002

Jumlah kapal motor perikanan laut menurut ukuran terus berkembang dari tahun ke tahun, dan pada Tabel 2 ukuran kapal yang dapat dikategorikan pada usaha kecil adalah kapal dengan ukuran <5 GT hingga 30 GT yang memenuhi kriteria jumlah tenaga kerja kurang dari 19 orang dan nilai penjualan per tahun kurang dari Rp 1 miliar, meskipun untuk kekayaan bersihnya berupa nilai perolehan atau harga kapal bisa melebihi Rp. 200 juta.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ukuran (GT)</th>
<th>1999</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
<th>2004</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>&lt; 5</td>
<td>57.768</td>
<td>65.897</td>
<td>70.925</td>
<td>74.292</td>
<td>79.218</td>
<td>90.148</td>
</tr>
<tr>
<td>5-10</td>
<td>18.850</td>
<td>19.460</td>
<td>22.641</td>
<td>20.208</td>
<td>24.358</td>
<td>22.917</td>
</tr>
<tr>
<td>10-20</td>
<td>6.972</td>
<td>5.599</td>
<td>6.006</td>
<td>5.866</td>
<td>5.764</td>
<td>5.952</td>
</tr>
<tr>
<td>30-50</td>
<td>1.516</td>
<td>1.543</td>
<td>781</td>
<td>2.685</td>
<td>2.338</td>
<td>800</td>
</tr>
<tr>
<td>50-100</td>
<td>1.038</td>
<td>1.129</td>
<td>1.602</td>
<td>2.430</td>
<td>2.698</td>
<td>1.740</td>
</tr>
<tr>
<td>100-200</td>
<td>756</td>
<td>741</td>
<td>1.295</td>
<td>1.612</td>
<td>1.731</td>
<td>1.342</td>
</tr>
<tr>
<td>&gt; 200</td>
<td>211</td>
<td>326</td>
<td>495</td>
<td>559</td>
<td>599</td>
<td>436</td>
</tr>
<tr>
<td>Total</td>
<td>90.370</td>
<td>97.669</td>
<td>106.753</td>
<td>111.034</td>
<td>119.837</td>
<td>126.933</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006
Usaha kecil dan usaha menengah, khususnya usaha kecil dan sektor informal, sesungguhnya telah memainkan peran yang luar biasa besar dalam pembangunan nasional. Usaha kecil dan usaha menengah tersebut telah menyediakan low cost economy kepada perusahaan besar yang karyawannya bergaji kecil, sehingga yang terjadi sebenarnya bukanlah trickle-down effect, tetapi trickle-up effect (Swasono dalam Rasyad et al., 2002).

Seperti pada umumnya terjadi di negara sedang berkembang, sektor industri manufaktur di Indonesia didominasi oleh industri kecil dan industri rumah tangga, baik dalam jumlah unit maupun pangsa kesempatan kerja, tetapi dalam pangsa nilai tambah kontribusinya lebih kecil daripada industri menengah dan besar (Tambunan, 2001), di mana pada tahun 2000 sektor usaha kecil menyerap 89 persen dari total tenaga kerja dan sebagian di antaranya sebesar 43 persen diserap di sektor pertanian.

Meskipun kontribusi usaha kecil menengah, khususnya usaha kecil plus industri rumah tangga cukup besar dalam pembangunan ekonomi, usaha kecil juga dihadapkan pada permasalahan spesifik yang berbeda dengan yang dihadapi oleh usaha menengah maupun usaha besar. Di samping permasalahan yang dihadapi, termasuk juga permasalahan yang menyangkut perubahan lingkungan bisnis yang dipengaruhi oleh sistem perdagangan global, seperti kesepakatan AFTA 2003 dan WTO 2020. Inti dari kesepakatan tersebut adalah diberlakukannya liberalisasi perdagangan yang bebas (free trade) dan adil (fair trade), di mana pangsa pasar suatu komoditi ditentukan oleh keunggulan relatif komoditi tersebut secara ekonomi, tanpa adanya hambatan maupun bentuk-bentuk proteksi lainnya.

Menghadapi masalah, tantangan, dan juga peluang dengan diberlakukannya liberalisasi perdagangan, sudah barang tentu diperlukan strategi khusus, terutama dalam hal ini strategi pengembangan bagi usaha kecil, yang dalam jangka panjang diharapkan cukup kuat dan tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan perdagangan global.

Usaha kecil yang jumlahnya cukup signifikan sebagai landasan pembangunan ekonomi nasional memiliki potensi yang besar dalam menyumbang
produk domestik bruto Indonesia. Sebagai negara yang mengandalkan kegiatan perekonomiannya dari sektor pertanian, Indonesia perlu menciptakan situasi kondusif untuk berkembangnya sektor agroindustri, khususnya bagi usaha kecil. Tersebarinya wilayah perikanan tangkap di seluruh pelosok tanah air memberikan kesempatan yang lebih besar bagi usaha skala kecil untuk mengolah hasil perikanan tangkap menjadi produk olahan yang siap dikonsumsi.

Usaha skala kecil merupakan bagian dari industri dan ekonomi nasional yang mempunyai peran strategis karena mengemban misi nasional berkenaan dengan (Suprayitno, 1995):

- Pencapaian pemerataan kesempatan kerja dan berusaha
- Memperkuat struktur industri
- Melestarikan seni dan budaya daerah sejalan dengan modernisasi masyarakat desa

Dalam kerangka pandang tersebut berbagai upaya pengembangan dilakukan melalui berbagai kebijaksanaan dan program pembangunan yang bertujuan agar industri kecil mampu mengatasi masalah yang dihadapi dan berkembang sehat, maju, mandiri serta meningkat ukuran dan perannya dalam mengisi pembangunan. Kontribusi Usaha Kecil pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan kesempatan kerja dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Usaha Kecil pada PDB dan Kesempatan Kerja

<table>
<thead>
<tr>
<th>Uraian:</th>
<th>Satuan</th>
<th>2000</th>
<th>2001</th>
<th>2002</th>
<th>2003</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Unit Usaha</td>
<td>Unit</td>
<td>2.621.150</td>
<td>2.559.679</td>
<td>2.857.966</td>
<td>3.030.116</td>
</tr>
<tr>
<td>1.1. Usaha Kecil</td>
<td>Unit</td>
<td>2.598.976</td>
<td>2.538.283</td>
<td>2.834.719</td>
<td>3.006.112</td>
</tr>
<tr>
<td>1.2. Usaha Menengah</td>
<td>Unit</td>
<td>15.377</td>
<td>14.661</td>
<td>15.952</td>
<td>16.411</td>
</tr>
<tr>
<td>1.3. Usaha Besar</td>
<td>Unit</td>
<td>6.797</td>
<td>6.735</td>
<td>7.295</td>
<td>7.593</td>
</tr>
<tr>
<td>2.2. Usaha Menengah</td>
<td>Orang</td>
<td>593.298</td>
<td>567.466</td>
<td>621.563</td>
<td>643.873</td>
</tr>
<tr>
<td>3.2. Usaha Menengah</td>
<td>Miliar Rp.</td>
<td>15.539</td>
<td>16.605</td>
<td>17.014</td>
<td>17.576</td>
</tr>
<tr>
<td>3.3. Usaha Besar</td>
<td>Miliar Rp.</td>
<td>58.091</td>
<td>59.766</td>
<td>61.645</td>
<td>63.839</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Departemen Perindustrian, 2005
Dari Tabel 3 dapat diperhatikan bahwa sektor usaha kecil mendominasi keseluruhan unit usaha dari segi jumlah dengan rata-rata sebesar 99 persen, dan penyerapan tenaga kerja mencapai rata-rata 59 persen, meskipun dari segi kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto rata-rata sebesar 22 persen dibandingkan dengan usaha skala menengah dan usaha skala besar yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar rata-rata 17 persen dan 61 persen.

Dengan mengambil dua ukuran keberhasilan pembangunan nasional yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat luas, dapat dipilih dua sasaran pokok pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu pendapatan dan kesempatan kerja. Jika pendapatan masyarakat meningkat, kegiatan ekonomi langsung dapat terpengaruh positif karena adanya daya beli yang meningkat. Sektor riel akan beroperasi pada skala optimum untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Pertumbuhan sektor riel ini juga akan menimbulkan kesempatan kerja bagi masyarakat dan pada gilirannya berikutnya akan menjadi kekuatan dalam bentuk meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa, serta meningkatnya daya beli.

Secara tradisional, hasil perikanan tangkap langsung dijual di tempat pelelangan ikan (TPI), dan pendapatan nelayan hanya diperoleh dari hasil penjualan tersebut. Kondisi semacam ini menghasilkan masalah yang tak kunjung berhenti berupa rendahnya tingkat pendapatan nelayan dan ketergantungan nelayan dari hanya satu kegiatan usaha melaut. Hasil perikanan tangkap sebenarnya dapat diolah menjadi berbagai jenis produk agroindustri, misalnya abon ikan, bakso ikan, jambal ikan, kerupuk ikan, dan sosis ikan.

Berdasarkan permasalahan pokok rendahnya tingkat pendapatan nelayan, rendahnya daya beli masyarakat, kurangnya kesempatan kerja, dan lemahnya posisi tawar nelayan terhadap industri, solusi terhadap permasalahan tersebut perlu dikembangkan. Pengembangan model sistem integrasi vertikal usaha agroindustri yang berbasis perikanan tangkap merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan model sistem integrasi vertikal (forward vertical integration), nelayan yang selama ini hanya melakukan kegiatan usaha eksploitasi hasil laut melalui usaha penangkapan ikan dapat mengendalikan industri pengolahan yang menggunakan ikan tangkapan sebagai bahan baku, dan
mengendalikan distribusi hasil olahan melalui kepemilikan kegiatan usaha industri pengolahan hasil perikanan tangkap dan sekaligus usaha distribusi hasil olahan hingga ke tangan pedagang pengecer.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menghasilkan rancang bangun sistem integrasi vertikal agroindustri berbahan baku ikan. Dengan sistem integrasi vertikal ini, nelayan perikanan tangkap, khususnya nelayan pemilik kapal dapat mengoperasikan dan mengendalikan suatu sistem produksi-distribusi ke dalam suatu sistem yang terintegrasi melalui kepemilikan usaha industri pengolahan berbahan baku perikanan tangkap dan kepemilikan usaha distribusi hasil olahan hingga ke tangan pedagang pengecer.

Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian dibatasi pada pendalaman konsep sistem integrasi vertikal dan mencakup alasan-alasan dilakukannya integrasi vertikal ke depan (forward vertical integration). Pelaku integrasi vertikal adalah nelayan perikanan tangkap yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan di laut. Yang dimaksud dengan nelayan di sini adalah nelayan pemilik kapal yang bekerja sama dengan nelayan (anak buah kapal) mengoperasikan kegiatan penangkapan ikan.

Kapal milik nelayan yang diambil sebagai obyek penelitian adalah kategori kapal motor (inboard motor) yang berukuran antara 5 hingga 30 GT, di mana untuk kategori kapal motor di Indonesia, jumlahnya mencapai 122.615 unit atau 96,6 persen dari jumlah total kapal motor yang ada berukuran 5 GT hingga >200 GT sebanyak 126.933 unit (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2006; lihat Tabel 2). Kegiatan perikanan tangkap dengan menggunakan perahu tanpa motor (non powered boat) dan perahu motor tempel (outboard motor) tidak termasuk dalam kajian disertasi ini.
Integrasi vertikal ke depan ke industri pengolahan difokuskan pada produk hilir berupa kerupuk ikan. Kerupuk ikan mempunyai mata rantai yang paling panjang karena memiliki tingkat konsumsi yang paling tinggi (usage), di samping dikonsumsi secara tradisional sebagai lauk-pauk, kerupuk ikan juga dikonsumsi sebagai makanan ringan (snack food). Kerupuk ikan juga memiliki potensi untuk dikembangkan variasi produknya (easy to differentiate) sehingga memungkinkan untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Dalam bentuk produk olahan mentah maupun matang, kerupuk ikan memiliki daya simpan yang lebih lama, dan keawetan inilah yang mampu mengatasi masalah sifat mudah rusak (perishability) dari hasil perikanan tangkap. Di samping itu, kerupuk ikan matang yang siap untuk dikonsumsi dapat dikemas dalam berbagai ukuran sesuai dengan kebutuhan konsumen dan dapat dengan mudah didistribusikan untuk menjangkau pasar geografis yang lebih luas.